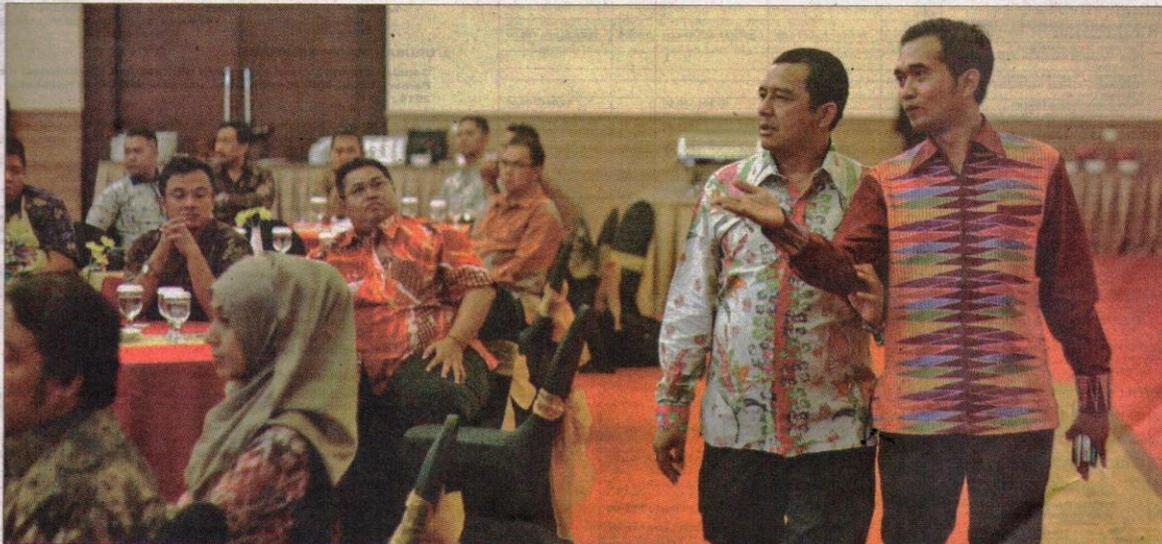


## DPRD Desak Pemkab Segera Selesaikan Temuan Khususnya Aset Daerah



**CEK ASET:** Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adi Yanto (kanan) bersama Bupati Wonosobo Abdul Kholiq Arif dalam acara Anugerah Jawa Pos Radar Kedu baru-baru ini.

**MUNGKID** - Dalam kurun waktu lima tahun Badan pemeriksa keuangan (BPK) selalu menyoroti masalah pengelolaan aset Pemkab Magelang. Banyak benda yang dimiliki namun tak terdata dengan baik.

Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adi Yanto mengatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK seharusnya bisa diperbaiki. Mengingat persoalan yang disorot selalu sama. Yakni aset.

Dari hasil pemeriksaan BPK, masih banyak ditemukan persoalan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang ada. Antara lain, pemanfaatan aset Ruko Plaza Muntilan, kontribusi pendapatan dari aset bangun guna serah dari objek wisata Kalibening senilai Rp 1.870.244.720, belum diperoleh.

Perolehan opini WDP ini mendapat kritikan dari berbagai fraksi DPRD. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Suroso Singgih menyatakan, semua penyelenggara pemerintahan telah bersepakat untuk mendapatkan penilaian yang terbaik, WTP. Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan bahwa realisasinya dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan yang Bupati "sadari" akan Laporan Keuangan itu masih didapatkan Neraca Komperatif per-31 Desember 2014 dan tahun 2013 yang sangat menonjol.

"Yakni, sebagaimana diungkapkan dalam catatan V.5.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah menyajikan nilai aset tetap senilai Rp 2,2 miliar dan Rp 1,9 miliar. Pemerintah Daerah belum selesai melakukan inventarisasi aset tetap secara

### GEMA LEGISLASI

menyeluruh," jelasnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Ahmad Sarwo Edi menyatakan, berdasarkan catatan laporan BPK, FPAN masih melihat adanya SILPA sebesar Rp 373, 919 miliar lebih di Tahun Anggaran 2014. Meskipun ada tren penurunan dibanding SILPA Tahun Anggaran tahun 2013 yang sebesar Rp 417,324 miliar lebih.

"Kami melihat bahwa ada indikasi penggunaan anggaran yang belum terserap secara maksimal dari tahun ke tahun yang terjadi di beberapa SKPD," katanya.

Anggota F Gerindra M Sahid mengatakan persoalan aset seharusnya bisa diantisipasi sejak dini. Seperti Ruko Plaza Muntilan saat ini dalam proses gugatan peradilan. "Sebelum gugatan dilayangkan Pemkab sebenarnya bisa mengambil kebijakan strategis untuk mengelola plaza," kata dia.

Sementara, pasca-pemutusan kerjasama objek wisata Kalibening, Kecamatan Secang, Pemkab dinilainya terkesan lamban. Seharusnya segera dilakukan penilaian aset tertinggal. Pada saat ini peralihan aset tertinggal masih terkendala dengan status kepemilikan aset tertinggal. "Saat ini Pemda tengah menempuh upaya penyelesaian dengan PT TIWU agar aset tertinggal tersebut segera diakui dan dikelola Pemda," katanya.

Wakil Ketua DPRD Suharno menambahkan Pemkab supaya segera melakukan

langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan temuan BPK tersebut. "Setidaknya harus ada target penyelesaiannya," harap dia.

Terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014. Menyikapi ini, Pemkab menerbitkan Peraturan Bupati tentang rencana tindak pengendalian menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Aturan ini untuk mendorong seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaksanakan arahan dari Bupati Magelang.

"Upaya untuk meraih opini WTP pada 2016 antara lain menerbitkan Perbup Magelang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Tindak Pengendalian menuju WTP di lingkungan Pemkab Magelang dan mendorong seluruh SKPD untuk melaksanakan Perbup tersebut," kata Bupati.

Selain menerbitkan Perbup, Pemkab juga melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jogjakarta. Para pimpinan SKPD juga ditekan rasa tanggung jawabnya melalui pembinaan berbagai forum. Seperti, Rakor POK, Rakor Pengawasan, Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan forum rakor lainnya. Dia akan selalu berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan untuk pelaksanaan pemerintah yang lebih baik.

"(Sementara) adanya kegiatan pertambahan tanpa izin yang mejadi temuan BPK telah kami tindak lanjuti pada 22 Juni kemarin dengan mengirimkan data pertambahan tanpa izin ke Dinas EDM Jateng. Ini sebagai bahan koordinasi, pengawasan dan penindakan," jelasnya. (adv)